

PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN AKUNTANSI DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PATI

Ahmad Rudi Yulianto
ahmad.rudi@unissula.ac.id
Universitas Islam Sultan Agung

Osmad Muthaher
osmad64@gmail.com
Universitas Islam Sultan Agung

ABSTRACT

The purpose of this study is to knowing the effect of clarity of budget targets, effectiveness of accounting controls and reporting systems on the performance accountability of government agencies in Semarang city. This study took a sample with convenience sampling techniques in 24 service offices of Semarang city with multiple linear regression analysis method. Based on the results of the analysis it can be concluded that the variables of budget target clarity significantly influence the performance accountability of government agencies, the effectiveness of accounting control variables have a significant effect on the performance accountability of government agencies and the reporting system has a significant effect on the performance accountability of government agencies.

Keywords: *Clarity Of Budget Targets; Accounting Controls; Reporting Systems; Performance Accountability*

PENDAHULUAN

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa dalam melaksanakan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban melakukan dua jenis pertanggung jawaban. Pertama, pertanggungjawaban vertikal kepada pemerintah. Kedua, pertanggung jawaban horizontal kepada DPRD dan masyarakat luas. Kedua jenis pertanggungjawaban pemerintah daerah tersebut merupakan elemen penting dalam proses akuntabilitas. Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004. Kedua Undang-Undang tersebut telah merubah akuntabilitas atau pertanggung jawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggung jawaban horizontal (kepada masyarakat kepada DPRD). UU No. 32 mengalami perubahan menjadi UU No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah.

Pengelolaan pemerintah daerah yang berakuntabilitas, tidak lepas dari anggaran pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2002), yang menyatakan bahwa wujud dari penyelenggara otonomi daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil, dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik. Anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber daya tersebut baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan untuk menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat.

Mengacu kepada bidang administrasi pemerintahan, maka telah dihasilkan pula peraturan perundangan, berupa Instruksi Presiden Nomor: 7 Tahun 1999, tanggal 15 Juni 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Dengan berbagai peraturan perundangan yang telah dikeluarkan tersebut, diharapkan akan terwujud akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Azlina, 2011). Dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dinyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Untuk menghadapi akuntabilitas tersebut, pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain anggaran, pengendalian akuntansi, efektivitas pelaksanaan anggaran dan sistem pelaporan.

Menurut Herawaty (2011) dalam menghadapi akuntabilitas tersebut, pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain anggaran, pengendalian akuntansi, efektivitas pelaksanaan anggaran, dan sistem pelaporan. Menurut Mardiasmo (2002b) anggaran berfungsi sebagai : (1) alat perencanaan, (2) alat pengendalian, (3) alat kebijakan fiskal, (4) alat politik, (5) alat koordinasi dan komunikasi, (6) alat penilaian kinerja, dan (7) alat motivasi.

Perubahan paradigma anggaran daerah dilakukan untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat daerah setempat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien dan efektif. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain: anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan.

Penelitian-penelitian mengenai hubungan kejelasan sasaran anggaran dengan dampaknya yang terfokus pada sektor publik diantaranya Darma (2004), Abdullah (2004),) dimana menunjukkan hasil hubungan kejelasan sasaran anggaran dengan kinerja manajerial yang berpengaruh signifikan. Demikian juga, penelitian Darma (2004) mendukung adanya hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan kinerja dalam konteks pemerintah daerah. Hal ini didukung penelitian Abdullah (2004) yang mengatakan terdapat hubungan yang signifikan antara kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil penelitian Anjarwati (2012) juga menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun hasil penelitian Bangun (2009) terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian yang menunjukkan kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial.

Hasil Penelitian Jumirin (2001) mengatakan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun hasil penelitian Herawaty (2011) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh negative terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kusumaningrum (2010), mengatakan bahwa sistem pengendalian yang menggunakan informasi akuntansi disebut sebagai sistem pengendalian yang berbasis akuntansi atau sistem pengendalian akuntansi. Sistem pengendalian akuntansi adalah semua prosedur dan sistem formal yang menggunakan informasi untuk menjaga atau mengubah pola aktivitas organisasi. Dalam hal ini yang termasuk pengendalian akuntansi adalah sistem perencanaan, sistem pelaporan dan prosedur monitoring yang didasarkan pada informasi.

Penggunaan sistem pengendalian akuntansi memungkinkan para manajer dapat membuat keputusan-keputusan yang lebih baik, mengontrol operasi-operasi dengan lebih efektif, mampu mengestimasi biaya dan profitabilitas keberhasilan tertentu dan memilih alternatif terbaik dalam setiap kasus dan masalah sehingga dapat meningkatkan kinerja. Menurut Mardiasmo (2004) peningkatan perencanaan dan pengendalian terhadap aktivitas dengan cara perbaikan sistem akuntansi sektor publik diharapkan dapat membantu meningkatkan transparansi efisiensi serta efektivitas pemerintah daerah, terutama dalam memberikan informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah.

Hasil penelitian Kusumaningrum (2010) menunjukkan bahwa system pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian Herawaty (2011) mengatakan bahwa system pengendalian akuntansi memiliki pengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun demikian terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian. Penelitian Harsanti (2008) menyatakan bahwa sistem pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2000) mengemukakan, laporan yang baik adalah laporan harus disusun secara jujur, objektif, dan transparan. Laporan umpan balik (feedback) diperlukan untuk mengukur aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pada pelaksanaan suatu rencana atau waktu mengimplementasikan suatu anggaran, sehingga manajemen dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan rencana atau pencapaian sasaran anggaran yang ditetapkan.

Halim (2002) menyatakan bahwa dalam konteks pemerintahan sudah seyogyanya pemerintah (pusat dan daerah) segera memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah termasuk sistem akuntansi keuangan daerah yang mencakup sistem pelaporan perhitungan anggaran guna terciptanya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Hasil Penelitian Kusumaningrum (2010), Herawaty (2011), dan Anjarwati (2012) menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun hasil penelitian Risma (2009) menyatakan sistem pelaporan tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap persepsi aparatur pemerintah daerah atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Herawaty (2011) menyatakan bahwa Instansi Pemerintah yang berkewajiban menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan menyampaikan pelaporannya adalah instansi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun penanggung jawab penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah pejabat yang secara fungsional bertanggungjawab melayani fungsi administrasi di instansi masing-masing. Selanjutnya pimpinan instansi bersama tim

kerja harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan/kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Menghadapi akuntabilitas mengharuskan pemerintah memperhatikan beberapa hal antara lain; anggaran dan pengendalian akuntansinya. Tercapainya sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi akan menentukan kualitas atau kinerja dari pemerintah daerah. Kebijakan yang ada pada daerah yang satu dengan daerah yang lain pasti berbeda, sehingga sasaran anggaran, pengendalian dan tingkat akuntabilitas suatu daerah juga berbeda. Kondisi tersebut yang bisa terjadi di Kabupaten Pati, dimana adanya pergantian kepala daerah pada kota tersebut, sehingga kebijakan-kebijakan yang akan diambil akan berbeda dari periode sebelumnya, antara lain mengenai kebijakan anggaran dan pengendaliannya.

Pemerintah Kabupaten Pati tahun 2017 ini menargetkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dalam audit Badan Pemeriksaan Keuangan RI. Selain predikat tersebut menjadi instrument dalam mengukur akuntabilitas serta transparansi keuangan daerah, Hasil pemeriksaan BPK ini juga akan menentukan pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Pati dalam mewujudkan pemerinatahan yang baik dan bersih. Untuk itu agar dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut Pemkab Pati telah menginstruksikan/ seluruh satuan kerja guna memperbaiki catatan-catatan pemeriksaan BPK tahun lalu, sehingga tidak membebani laporan keuangan pemerintah daerah tahun ini.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian menunjukkan hasil yang ketidak konsistenan sehingga penelitian ini layak untuk diteliti kembali dengan mengangkat judul penelitian ini dengan judul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten Pati).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dikabupaten Pati.

Adapaun tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di kabupaten Pati.

Anggaran daerah harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan daerah harus bisa menggambarkan sasaran kinerja secara jelas. Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut Munawar (2006). Oleh sebab itu, sasaran anggaran daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakan kegiatan anggaran.

Ketidakjelasan sasaran anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja, implikasinya pada penurunan kinerja yang berarti juga penurunan akuntabilitas kinerja organisasi (Suhartono dan Mochammad, 2006). Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Hasil penelitian Anjarwati (2012) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan konsep serta hasil penelitian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesisnya sebagai berikut:

H1: Terdapat pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Pengendalian Akuntansi dengan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Hansen dan Mowen (2004) menyatakan bahwa pengendalian adalah proses penetapan standar, dengan menerima umpan balik berupa kinerja sesungguhnya dan mengambil tindakan yang diperlukan jika kinerja sesungguhnya berbeda secara signifikan dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Ekonomis, efisien, dan efektivitas pelayanan dari instansi pemerintah daerah kepada masyarakat, merupakan salah satu indikator kinerja pemerintah daerah. Tercapainya indikator tersebut merupakan suatu prestasi yang dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah yang bersangkutan (Indudewi, 2008). Hasil penelitian Kusumaningrum (2010) menunjukkan bahwa system pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas maka dapat dirumuskan hipotesisnya sebagai berikut:

H2: Terdapat pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah .

Sistem Pelaporan dengan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan umpan balik (*feedback*) diperlukan untuk mengukur aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pada pelaksanaan suatu rencana atau waktu mengimplementasikan suatu anggaran, sehingga manajemen dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan rencana atau pencapaian sasaran anggaran yang ditetapkan. Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya (Kusumaningrum, 2010).

Agar dapat membantu dan mengembalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan diperlukan sistem pelaporan yang baik. LAN dan BPKB (2000) dalam Indudewi (2008) mengemukakan bahwa laporan yang baik adalah laporan harus disusun secara jujur, obyektif, dan transparan. Hasil penelitian Herawaty (2011), dan Anjarwati (2012) menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dirumuskan hipotesisnya sebagai berikut:

H3: Terdapat pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh instansi wajib Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Instansi wajib LAKIP yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dipilihlah 31 SKPD untuk dijadikan sampel. Setiap SKPD yang menjadi sampel penelitian dibagikan 2 (dua) buah kuesioner. Kuesioner dibagikan kepada kepala bagian keuangan dan kepala sub bagian keuangan yang menjadi sampel penelitian ini.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berhubungan dengan persepsi atau opini responden mengenai variabel yang diteliti dan data yang berhubungan dengan karakteristik responden. Data primer merupakan salah satu teknik pengambilan data secara langsung dengan menggunakan media kuesioner dengan cara penyampaian kuesioner secara langsung kepada responden. Sumber data dalam penelitian ini adalah kepala/pimpinan dinas/SKPD dan Kabag.Keuangan pada dinas-dinas yang ada di Pemerintah Kabupaten Pati.

Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini merupakan *cross section* data yaitu data yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu. Data diperoleh dengan cara mengirimkan kuisisioner secara langsung kepada setiap responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini, yaitu pihak-pihak yang ikut serta dalam penyusunan anggaran pada setiap SKPD pemerintah kabupaten Pati.

Pengiriman kuisisioner dilakukan secara langsung kepada responden, karena metode ini memiliki keunggulan, diantaranya peneliti dapat langsung bertatap muka dan melakukan wawancara sehingga dapat meyakinkan responden tentang keseriusan penelitian ini. Selain itu dengan metode ini peneliti bisa mengurangi kemungkinan kuisisioner dijawab oleh responden yang tidak tepat. Kuisisioner yang akan disebar dalam penelitian ini sebanyak 60 buah dengan rincian masing-masing SKPD akan memperoleh 2 buah kuisisioner yang akan diberikan untuk kepala/pimpinan SKPD dan kabag keuangan. Kuisisioner akan diambil pada waktu yang telah disepakati oleh peneliti dan responden.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Kejelasan Sasaran Anggaran

Variabel kejelasan sasaran anggaran diukur dengan menggunakan 8 pertanyaan yang digunakan oleh (Herawaty, 2011). Variabel ini diukur menggunakan skala 5 point, dimana skala sangat tidak setuju (1) dan skala sangat setuju (5). Indikator dari variabel ini adalah pusat tanggung jawab, perencanaan, bidang kegiatan, produk, dan tingkat pengembalian.

2. Pengendalian Akuntansi

Variabel pengendalian akuntansi diukur dengan menggunakan 5 pertanyaan yang digunakan (Herawaty, 2011). Indikator dalam variabel ini adalah pusat kegiatan, ruang lingkup, maksud, sifat struktur, sifat informasi, orang yang terlibat, sumber ilmu, dan lingkup waktu. Skala variabel diukur dengan skala 5 point, dimana skala sangat tidak setuju (1) dan skala sangat setuju (5).

3. Sistem Pelaporan

Variabel sistem pelaporan diukur dengan indikator penyebab terjadinya penyimpangan, tindakan yang diambil, dan lamanya waktu koreksi. Variabel ini terdiri dari 4 pertanyaan yang digunakan oleh (Herawaty, 2011), dimana variabel ini menggunakan 5 skala point. Skala sangat tidak setuju (1) dan skala sangat setuju (5).

4. Akuntabilitas Publik

Variabel akuntabilitas public diukur dengan menggunakan 8 pertanyaan yang digunakan oleh (Herawaty, 2011). Indikator variabel ini adalah akuntabilitas kejujuran, akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan. Skala yang digunakan 5 skala point, dimana skala sangat tidak setuju (1) dan skala sangat setuju (5).

METODE ANALISIS DATA

Dalam penelitian ini, untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan menggunakan analisis regresi berganda (*Multiple Regression Analysis*). Metode regresi berganda yaitu metode statistik untuk menguji hubungan antara beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Analisis ini bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel penelitian dan mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Model yang digunakan dalam regresi berganda untuk melihat pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah pelalawan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y	: Akuntabilitas Kinerja Pemda
A	: Konstanta
$\beta_1 \beta_2 \beta_3$: Koefisien regresi
X1	: Kejelasan Sasaran Anggaran
X2	: Pengendalian Akuntansi
X3	: Sistem Pelaporan
e	: Error

HASIL PENELITIAN

Deskripsi Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik *Convenience Sampling*. *Convenience Sampling* (Kemudahan Sampling) adalah penarikan sampel yang didasarkan pada tersedianya bagian atau seseorang dan memudahkan untuk mendapatkan data. Dengan menggunakan teknik *Convenience Sampling* memudahkan penelitian ini dalam memperoleh data primer melalui penyebaran kuesioner yang dilakukan di 24 Kantor Dinas Kabupaten Pati.

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang telah dilaksanakan, maka diperoleh data seperti pada Tabel 1 yang mengungkapkan secara singkat mengenai jumlah kuesioner yang telah dibagikan dan jumlah kuesioner yang tidak dikembalikan oleh responden.

Tabel 1 Sampel Penelitian

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah kuesioner yang dibagikan	96
2.	Jumlah kuesioner yang tidak kembali	10
3.	Jumlah kuesioner yang kembali	86
4.	Outlier	4
5.	Jumlah kuesioner yang diolah	82

Sumber : Data Kuesioner Penelitian

Perhitungan uji instrumen yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas dan hasilnya penelitian ini valid dan reliabel. Selain itu, hasil dari uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolonieritas, heterokedastisitas menunjukkan bahwa penelitian ini lolos uji asumsi klasik.

Uji Regresi Linier Berganda

Analisis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Dalam uji regresi ini dilaksanakan guna mengetahui arah hubungan apakah positif atau negatif antara variabel independen dengan variabel dependen. Pengujian regresi tersebut menggunakan metode *enter*. Berikut hasil perhitungan regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan program SPSS, nampak pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.123	.268		.457	.649
	Kejelasan Sasaran Anggaran	.238	.088	.235	2.687	.009
	efektivitas pengendalian akuntansi	.583	.094	.548	6.203	.000
	sistem pelaporan	.161	.060	.189	2.684	.009

a. Dependen Variable: akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Sumber : output hasil uji regresi linier berganda, 2018

Uji Parsial t

Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai signifikansi pada tabel *coefficients*. Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen terhadap variabel dependen signifikan. Dan membandingkan t hitung (observasi) dengan t tabel pada $\alpha = 0,05$. Jika nilai t hitung $> t$ tabel maka hipotesis pada variabel independen dapat dikatakan mempengaruhi variabel dependen secara individu. Berikut adalah hasil uji t.

1. Pengaruh Kejelasan sasaran anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pada tabel 2 menunjukkan bahwa berdasarkan perhitungan, koefisien regresi menunjukkan angka 0,238, kemudian nilai t hitung 1.66437 dengan nilai *sig.* (0,009) $< \alpha$ (0,05). Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa nilai *sig.* lebih kecil dari α , artinya hasil data tersebut signifikan, dan koefisien regresi menunjukkan arah positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang artinya hipotesis pertama diterima.

2. Pengaruh Efektivitas Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pada tabel 2 menunjukkan bahwa berdasarkan perhitungan, koefisien regresi menunjukkan angka 0,583, kemudian nilai t hitung 1.66437 dengan nilai *sig.* (0,000) $< \alpha$ (0,05). Dari data tersebut diperoleh hasil bahwa nilai *sig.* menunjukkan hasil yang signifikan, dan koefisien regresi menunjukkan arah positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Pengendalian Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang artinya hipotesis kedua diterima.

3. Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pada tabel 2 menunjukkan bahwa berdasarkan perhitungan, koefisien regresi menunjukkan angka 0,161, kemudian nilai t hitung 1.66437 dengan nilai *sig.* (0,009) $< \alpha$ (0,05). Dari data tersebut diperoleh hasil bahwa nilai *sig.* menunjukkan hasil yang signifikan, dan koefisien regresi menunjukkan arah positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Sistem Pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang artinya hipotesis ketiga diterima.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian yang digunakan untuk mengukur ketepatan seberapa besar *persentase* variasi variabel independen (variabel bebas) dalam menjelaskan variasi variabel dependen (variabel terikat). Koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai *R Square*. Jika R^2 yang diperoleh dari hasil perhitungan

semakin besar (mendekati satu), maka dapat dikatakan bahwa sumbangan dari variabel independen terhadap variabel dependen semakin besar. Berdasarkan tabel 4.5.2 dibawah ini menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran, Efektivitas Pengendalian Akuntansi, dan sistem Pelaporan menerangkan variasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 0,743 atau 74,3% sedangkan sisanya sebesar 25,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Tabel 3 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.862 ^a	.743	.733	.25307

a. Predictors: (Constant), sistem pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran, efektivitas pengendalian akuntansi

b. Dependen Variable: akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Sumber : output hasil uji regresi linier berganda, 2018

PEMBAHASAN

Kejelasan Sasaran Anggaran

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diterima. Artinya bahwa apabila kejelasan sasaran anggaran meningkat, maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Untuk melancarkan pejabat dalam merancang rencana program guna mencapai tujuan yang akan dicapai oleh instansi pemerintah, maka perlu adanya sasaran anggaran yang jelas. Fungsi-fungsi pemerintah juga dapat ditentukan dan diukur dengan kualitas anggaran daerah yang telah disusun. Sehingga ketika terdapat anggaran yang tidak jelas akan muncul keraguan pejabat dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan karena pejabat merasa tidak tahu tindakan apa yang benar untuk mengarah kepada pencapaian tujuan. Lain halnya ketika sasaran anggaran disusun secara jelas, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dapat dimengerti oleh pejabat yang bertanggung jawab untuk bertindak.

Dengan demikian, hasil temuan ini sesuai dengan penelitian Cahyani dan Utama (2015), Primayoni (2014), Setiawan (2013), Wahyuni, dkk (2013), dan Hidayatullah, dkk (2015) yang membuktikan

bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Efektivitas Pengendalian Akuntansi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Artinya bahwa apabila efektivitas pengendalian akuntansi meningkat, maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan efektivitas pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diterima. Dalam hal ini, disebabkan pengendalian akuntansi merupakan prosedur yang mencakup penjagaan harta kekayaan yang dimiliki oleh instansi pemerintah serta keakuratan laporan keuangan. Dengan adanya pengendalian akuntansi, kepala instansi dapat mengambil tindakan yang dibutuhkan jika kinerja yang ditetapkan sebelumnya tidak dilaksanakan atau berbeda dengan apa yang telah dilaksanakan. Maka dengan adanya pengendalian akuntansi tersebut, instansi pemerintah mampu mengontrol dan mengambil keputusan yang pantas pada seluruh tindakan dan program dalam pelaksanaan tanggung jawab.

Dengan demikian, hasil temuan ini sesuai dengan penelitian Cahyani dan Utama (2015), setiawan (2013), Hidayatullah, dkk (2015) yang membuktikan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni, dkk (2013) yang menyatakan bahwa pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sistem Pelaporan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Artinya bahwa apabila sistem pelaporan meningkat, maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diterima. Artinya bahwa apabila sistem pelaporan meningkat, maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistem pelaporan yang baik diperlukan untuk menyampaikan dan melaporkan informasi secara akuntabel dan transparan dalam pengambilan keputusan-keputusan yang telah di ambil pemerintah daerah dalam suatu periode. Dalam sistem pelaporan menggambarkan penjelasan mengapa penyimpangan terjadi dengan melihat prosedur yang dilakukan benar atau tidak, mengambil tindakan yang akan di ambil

jika penyimpangan terjadi dengan menyediakan data dan informasi keuangan secara terbuka, dan pengoreksian laporan keuangan dibutuhkan waktu yang lebih efektif guna meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Dengan demikian, hasil temuan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyani dan Utama (2015), Hidayatullah, dkk (2015), serta Wahyuni, dkk (2013), bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2013) membuktikan bahwa sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

PENUTUP

Simpulan

Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk dapat mengetahui apakah kejelasan sasaran anggaran, efektivitas pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan dapat berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan memperoleh hasil sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan efektivitas pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Keterbatasan Penelitian

1. Terbatasnya jumlah variabel independen dalam penelitian ini hanya tiga yaitu kejelasan sasaran anggaran, efektivitas pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan. Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, efektivitas pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan bersama-sama menjelaskan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 74,3%, sedangkan sisanya sebesar 25,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Sehingga perlu ditambahkan variabel lain untuk penelitian selanjutnya.
2. Sampel yang digunakan hanya 24 Kantor Dinas, sehingga sampel yang digunakan sangat terbatas. Dengan demikian, perlu untuk memperluas cakupan wilayah penelitian mendatang guna hasil yang lebih baik lagi.

3. Penggunaan teknik *convenience sampling* menyebabkan ketidaktepatan pengambilan sampel karena siapapun yang terdapat dalam Kantor Dinas dapat mengisi kuesioner untuk kemudahan peneliti untuk mendapatkan data.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H. 2004. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta". *Tesis*. Program Pasca Sarjana UGM: Yogyakarta.
- Anjarwati, Mei. 2012. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap AKIP". *Accounting Analysis Journal*. Universitas Negeri Semarang.
- Antony, R.N., Dearden, dan Bedford. 1996. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Edisi V. Erlangga, Jakarta.
- Azlina, Nur & Reynaldi Riantiarno. 2011. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah". *Pekbis Jurnal*, Vol.13, No.3.
- Darma, E. S. 2004. "Pengaruh Kejelasan Sasaran dan Sistem Pengendalian Akuntansi Terhadap Kinerja Manajerial dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi pada Pemerintah Daerah". *Tesis*. Program Pasca Sarjana UGM: Yogyakarta.
- Ghozali, I. 2002. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hansen dan Mowen. 2004. *Akuntansi Manajemen*. Edisi ketujuh. Salemba Empat, Jakarta.
- Herawaty, Netty. 2011. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap AKIP Daerah Kota Jambi". *Simposium Nasional Akuntansi* Vol.13.Jambi.
- Indudewi, Dian. 2008. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap AKIP Kabupaten Brebes". *Skripsi*. Universitas Semarang.
- Inpres No. 7 Tahun 1999, *Tentang Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Kusumaningrum, Indraswari. 2010. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap AKIP Provinsi Jateng". *Tesis*. Program Pasca Sarjana: UNDIP.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi kelima. Penerbit Andi Yogyakarta. Permen dalam Negeri No.34 Tahun 2011 Pasal 1 Butir 4

Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004. tentang Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004. tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sasongko, Catur; Safrida Rumondang, 2010. *Anggaran*. Salemba Empat: Jakarta.

Sekaran, Uma. 2007. *Research Methods For Business: A Skill-Building Approach*. Third Edition. New York: John Wiley & Sons Inc.

Siaran Pers. 2011. *LHP atas LKPD Kabupaten Pelalawan*. Badan Pemeriksaan Keuangan RI Perwakilan Provinsi Riau.

Suhartono, Ehrmann; Solichin, Mochammad, 2006. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi". SNA 9 Padang.